

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Simon Khuznets dalam Todaro,2004). Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata, oleh karena itu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi antara lain adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.

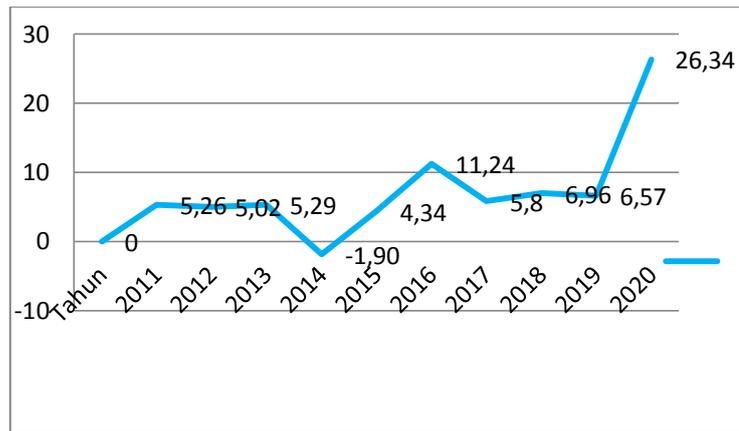
Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada suatu Negara yang sedang berkembang sering mengalami dilemma antara pertumbuhan dan pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi suatu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Menurut Robinson tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang

terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmatinya. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai suatu masalah ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lain, kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Peningkatan tersebut di sebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertumbuhan dan jumlah kualitasnya.

Dalam analisa makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara diukur dari perkembangan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara. Berdasarkan PDRB harga konstan menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Indikator penting yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Gamabar 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Usha tahun 2011-2020 (Persen)



Sumber: BPS HALTENGG 2021

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun sering terjadi perubahan, pada tahun 2011 sebesar 5,26%, akan tetapi pada tahun 2012 dan tahun 2013 mengalami penurunan yaitu tahun 2012 sebesar 5,02% dan tahun 2013 Naik sebesar 5,29%. Kemudian pada tahun 2014 Pertumbuhan ekonomi Kabuapten Halmahera tengah mengalami penurunan yang sangat buruk yaitu sebesar -1,90% dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 kembali meningkat yaitu sebesar 4,34%, dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah kembali meningkat sangat drastis yaitu sebesar 11,24%. Namun tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah kembali mengalami penurunan dan peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi di suatu wilayah diyakini merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat di artikan sebagai nilai barang dan jasa yang di produksi di dalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep dapat di realisasikan bahwa semakin besar Produk domestik Regional Bruto (PDRB) yang di peroleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi adanya peningkatan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) maka ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pertumbuhan ekonomi.

Dengan semakin membaiknya kondisi nasional, maka pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses percepatan pembangunan untuk menciptakan jumlah dan jenis peluang kerja yang lebih banyak merupakan sesuatu yang mendesak. Dalam kaitan dengan tujuan tersebut, pendekatan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pembentukan modal (investasi) merupakan salah satu pendekatan yang mempunyai landasan teoritis yang cukup kuat seperti ditunjukkan dalam model Harrod-Domar, yang menganggap bahwa pembentukan modal merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dikenal sebagai aliran fundamentalis modal (*capital fundamentalism*). Menurut model tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat akan muncul secara otomatis berkat adanya pemupukan dan pengarahannya tabungan domestik dan cadangan devisa untuk melakukan investasi secara besar-besaran disektor industri.

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah dan dapat pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi daerahnya masing-masing.

Perimbangan keuangan ini di atur menurut UU No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. Dengan desentralisasi fiskal ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Salah satu upaya peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. 2
Total Penerimaan realisasi PAD, DAU, DAK dan DBH Kabupaten
Halmahera Tengah tahun 2011-2020.

| Tahun | PAD | DAU | DAK | DBH |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2011 | 8.014.365.403,00 | 255.669.703.00000 | 39.893.400.000,00 | 43.399.420.923,00 |
| 2012 | 12.605.593.753,00 | 301.838.254.000,00 | 43.787.980.000,00 | 47.044.963.866,00 |
| 2013 | 28.877.836.483,00 | 353.060.178.000,00 | 68.003.760.000,00 | 46.244.388.238,00 |
| 2014 | 17.275.993.755,00 | 392.180.412.000,00 | 62.551.620.000,00 | 53.719.587.074,00 |
| 2015 | 22.020.032.328,00 | 410.814.584.000,00 | 72.568.350.000,00 | 42.521.296.545,00 |
| 2016 | 13.737.492.714,00 | 443.124.000.000,00 | 102.166.000.000,00 | 28.321.205.863,00 |
| 2017 | 17.016.743.681,00 | 440.254.085.062,00 | 92.851.423.888,00 | 21.031.969.373,00 |
| 2018 | 15.313.942.993,62 | 448.490.415.000,00 | 119.065.631.953,00 | 50.230.429.607,00 |
| 2019 | 46.609.855.549,00 | 460.403.872.000,00 | 135.655.305.929,00 | 56.450.611.721,00 |
| 2020 | 51.877.590.145,00 | 416.219.905.000,00 | 130.623.701.342,00 | 50.502.910.929,00 |

Sumber :BPS HALTENG 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa total realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi hasil (DBH) Kabupaten Halmahera Tengah selama periode 2011-2020 menunjukkan kenaikan dalam nilai riil secara terus menerus. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Bentuk pengelolaan keuangan dalam otonomi daerah berupa anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tetapkan dengan peraturan daerah.

Sumber dana yang di dapat oleh Kabupaten Halmahera Tengah bisa bersumber dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan

jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat menalokasikan penerima yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendriwiyanto, 2014) yang berjudul Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PAD, DAU, DAK, dan DHB terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena itu, sasaran pembangunan ekonomi bukan hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pengelolaan keuangan daerah. (Todaro, 2002).

Fenomena yang selama ini ada di daerah adalah otonomi daerah yang berjalan belum maksimal, dari data-data yang diperoleh dari dan beberapa literatur yang ada, menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini belum berjalan secara maksimal. Beberapa rencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah, hampir sebagian besar belum terealisasi dengan baik. Potensi-potensi yang ada selama ini juga belum sepenuhnya dapat tereksplorasi dengan baik dan benar oleh Pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :”**Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Halmahera Tengah**”.

1.1. Rumusan Masalah

Dengan melihat kondisi fisiografi pulau utama Kabupaten Halmahera Tengah yaitu pulau Halmahera sangat bervariasi mulai dari daratan pantai, daratan, perbukitan hingga daerah pengunungan. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagian pulau Halmahera yang

termasuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari daerah perbukitan dan pengunungan seluas 177.719,08 hektar atau 69,99 persen dari luas wilayah. Daerah perbukitan sebagian besar terbesar merata di Kecamatan Weda yaitu seluas 136.706,35 hektar atau 72,05 persen dari luas wilayah. Kondisi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Weda Utara dengan fisiografi berupa perbukitan dan pengunungan. Sehingga pada Kecamatan Weda Utara memiliki karakteristik fisik, geografis dan ekologis yang unik serta memiliki sumber daya alam yang besar.

Berdasarkan data pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011-2020 secara riil terus menurun mengalami fluktuasi, sehingga menimbulkan pertanyaan, dengan sumber daya alam yang melimpah seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah memiliki nilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah secara baik.

Elida Murni (2009) tentang pertumbuhan ekonomi dengan Variabel Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain Edy Susanto dan Marhamah (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Wandira (2013) menyimpulkan bahwa Dana bagi hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian berbeda Lily Kusumawati & I Gusti Bagus Wiksuana(2018) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan masalah di atas dan urian penelitian terdahulu, maka untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halamahera Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halamahera Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah ?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten Halmahera Tengah
2. Untuk Menganalisis pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah
3. Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah
4. Untuk menganalisis pengaruh DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah

1.3. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan praktek

b. Bagi Pihak Lain

Manfaat penelitian bagi lingkungan akademik adalah memberikan wawasan dan pengetahuan untuk pihak akademik serta sebagai bahan acuan untuk kedepannya dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam pada para mahasiswa/